



*Corresponding author: Tsalitsa Haura Layyina, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia.

E-mail:
2310413092@mahasiswa.upnvj.ac.id

RESEARCH ARTICLE

Analysis Of The Political Oligarchy DPR Of Indonesia During The Jokowi Administration (2019-2024)

Mohammad Rafatta umar, Tsalitsa Haura Layyina*, Muhammad Akbar Rahmadhani, Cindy, Ridwan

*Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia.

Abstract: This study aims to analyze the impact of political oligarchy on the legislative process and the quality of democracy in the Indonesian House of Representatives (DPR) during President Jokowi's administration (2019–2024). Employing a qualitative research method based on library studies, the research explores the relationship between political elites and large business groups in shaping public policies. The findings indicate that oligarchy significantly influences policy formation, exemplified by the revisions to the KPK Law, the Minerba Law, and the Omnibus Job Creation Law. These policies often favor elite groups over the broader public. The study also reveals that oligarchic dominance reduces transparency, accountability, and public participation in the legislative process, posing a threat to democratic norms. Furthermore, politicians' reliance on financial support from elite groups reinforces the oligarchy's role in determining national policy directions. Based on these findings, it is recommended to enhance legislative transparency, strengthen public oversight, and develop inclusive mechanisms for public participation to improve the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: Oligarchy, Jokowi, Coalition.

1. INTRODUCTION

Topik mengenai analisis oligarki politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama masa pemerintahan Jokowi sangat menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan oleh semakin kuatnya pengaruh oligarki dalam politik Indonesia yang berdampak pada kebijakan publik dan proses demokrasi. Oligarki dapat didefinisikan sebagai penguasaan kekuasaan oleh sekelompok kecil elite, yang sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat luas (Wibawa, 2023). Fenomena ini terlihat jelas di Indonesia, terutama setelah pemilu 2019, ketika berbagai koalisi elit politik muncul dengan melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri dalam kabinet Jokowi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak sepenuhnya bergantung pada koalisi partai politik, melainkan lebih kepada hubungan antar elite (Setiawan, 2022).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa oligarki memiliki dampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Dalam studi yang dilakukan oleh Warburton (2020), ditemukan bahwa tokoh-tokoh bisnis kini memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik, yang semakin memperkuat dominasi oligarki dalam sistem pemerintahan (Februna, 2023). Namun, banyak penelitian tidak mendalami dampak spesifik oligarki terhadap DPR dan partisipasi publik, sehingga menciptakan celah penelitian yang perlu diisi.



Keterbatasan dari penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya fokus terhadap interaksi antara oligarki dan kebijakan legislatif secara spesifik. Sebagian besar studi hanya mengamati dampak umum tanpa membahas aspek-aspek konkret dari proses legislasi yang dipengaruhi oleh oligarki (Anggraini, 2023). Sebagai langkah untuk menutupi kelemahan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya lebih mendalami bagaimana oligarki memengaruhi pembuatan undang-undang dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu politik dengan mengungkap mekanisme spesifik yang digunakan oleh oligarki untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya dalam DPR.

Untuk menganalisis dampak serta dinamika dari oligarki politik di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana struktur oligarki politik di DPR serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberadaan oligarki tersebut? dan apa dampak dari dominasi oligarki terhadap pengambilan keputusan legislasi dan kualitas demokrasi di Indonesia selama masa pemerintahan Jokowi?

2. Literature Review

Pengaruh oligarki terhadap demokrasi di Indonesia semakin memprihatinkan, karena demokrasi seharusnya menjadi sistem pemerintahan yang didirikan oleh rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi tanpa demos pasti merupakan anomali, atau bahkan kontradiktif, karena kita tahu bahwa rakyat seharusnya memiliki kekuasaan tertinggi, bukan malah diberikan kepada pejabat atau oligarki politik. Jika oligarki masuk ke dalam proses politik, hak partisipasi warga negara akan dihilangkan. Selanjutnya, hasil dari proses politik yang dihasilkan oleh oligarki akan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dengan kata lain, akan berdampak pada pemenuhan HAM (Ismayani et al., 2022). Haryanto dan Mahsun (2024) dalam artikelnya yang berjudul “Business and Politics in Urban Indonesia: Patrimonialism, Oligarchy and the State in Two Towns”, menekankan bahwa adanya dominasi politik patronase di Kota Pelabuhan dengan model negara administratif patrimonial dan Kota Industri dengan model negara oligarki patrimonial, proyek-proyek tersebut digunakan untuk memperkuat hubungan politik, memperkaya diri, dan mempertahankan kekuatan politik. Dampak negatif dari patronase ini antara lain, penurunan kualitas pembangunan dengan proyek sering tertunda, menghabiskan lebih banyak uang, dan memiliki kualitas yang buruk. Selain itu, pengalokasian anggaran menjadi tidak efisien karena digunakan untuk tujuan pribadi. Berdasarkan kedua penelitian di atas terdapat hal yang tidak dibahas, yaitu mengapa politik patronase dan oligarki dapat bertahan di Indonesia dalam waktu yang lama dan adakah sikap responsif dari lembaga negara seperti parlemen, partai politik, dan lembaga peradilan menangani dan berinteraksi dengan kekuatan oligarki.

Maraknya oligarki dalam demokrasi politik di Indonesia berpotensi besar untuk memusnahkan demokrasi di Indonesia sendiri. Demokrasi bisa jadi hanya dijadikan alat oleh oligarki. Oligarki menjadi penyebab mengapa beberapa politisi yang belum matang dan minim pengalaman kini menduduki jabatan-jabatan penting seperti bupati, ketua partai, atau anggota DPRD. Beberapa dari mereka mungkin tidak memiliki integritas, dan besar kemungkinan mereka hanya menjadi tumbal dari pengalaman politik orang tua atau keluarga mereka. Pada awalnya, pemerintah bekerja untuk kepentingan publik, tetapi kedatangan oligarki dan politikus yang belum matang dapat membuat perubahan besar karena pemerintah berubah menjadi alat bagi mereka hanya untuk mempertahankan kekuasaan, dan melupakan pelayanan publik yang dulunya merupakan kegiatan utama pemerintah (Hakim, M. Z., & Jurdi, F. 2017). Selanjutnya di artikel yang berjudul *Oligarchic Politics in the Context of a Democratic Rule of Law in Relation to the Principle of Expediency*. Fenomena oligarki di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi dan negara hukum, menjelaskan bagaimana kelompok elite dengan kekayaan dan kekuasaan yang besar dapat mendominasi proses politik, meskipun Indonesia adalah negara demokrasi. Oligarki di Indonesia, yang mulai berkembang sejak era Orde Baru, telah menggerogoti makna demokrasi, yang seharusnya mementingkan kekuasaan

rakyat. Hal ini juga berhubungan dengan prinsip utilitarianisme dalam hukum, yang menilai baik buruknya sebuah hukum berdasarkan manfaat yang ditimbulkannya bagi masyarakat luas. Kekuasaan oligarki dinilai menguntungkan sekelompok kecil orang, namun dalam beberapa kasus bisa memberikan manfaat lebih luas jika dikelola dengan baik (Suftyadi, A. et al., 2023). Oligarki di Indonesia berpotensi merusak demokrasi, dengan politisi minim pengalaman yang sering menjadi alat kekuasaan. Perlu perhatian terhadap dampaknya dalam konteks demokrasi dan negara hukum. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat berfokus pada eksplorasi dampak oligarki terhadap kesejahteraan masyarakat, hubungan dengan korupsi, serta peran masyarakat sipil dan media sosial, guna memberikan rekomendasi untuk memperkuat demokrasi dan kepentingan publik.

3. Theoretical Foundation

3.1 Teori Demokrasi Robert Dahl

Noor (2016) menjelaskan pendapat Robert Dahl bahwa oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Selanjutnya ia menyebutkan bahwa penegak dalam oposisi adalah dengan adanya pemisahan kekuasaan. Dalam teori demokrasi milik Robert Dahl menekankan gagasan mengenai poliarki yang merupakan model demokrasi yang ideal. Poliarki memiliki dua dimensi utama, yaitu partisipasi politik dan kontestasi. Pada demokrasi yang ideal, semua warga negara memiliki hak suara dalam keputusan politik, dan proses politik harus bebas dan adil, serta terbuka secara kompetitif (Dahl, 1971). Demokrasi juga mengharuskan adanya ruang kebebasan berekspresi dan akses ke informasi alternatif. Pada konteks DPR di era Jokowi, teori ini dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh lembaga ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi atau justru menjadi arena praktik oligarki. Oligarki politik, seperti yang disoroti oleh Winters (2011), muncul ketika kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elit yang akan menggunakan sumber daya ekonominya untuk membentuk kebijakan publik, sementara Hadiz (2016) menjelaskan bahwa hal ini semakin menurunkan kualitas demokrasi dengan mempersempit partisipasi masyarakat yang lebih luas.

3.2 Konsep Yang digunakan

Montesque menyebutkan bahwa dalam rangka pemisahan kekuasaan maka negara harus membagi diri menjadi tiga lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memerankan peran *check and balances* yang merupakan prinsip ketatanegaraan yang menyatakan bahwa ketiga lembaga tersebut saling mengontrol dan setara (Sunarto, 2016). Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79, DPR sebagai lembaga legislatif melakukan *check and balances* kepada eksekutif dengan hak menyatakan pendapat, interplasi, dan angket. Ahmat Sholihin & Heri Kurnia (2022) menyebutkan bahwa koalisi menurut Isnaini merupakan gabungan atau kerja sama satu oleh satu atau lebih partai politik dan organisasi politik. Mereka juga menyebutkan bahwa dominasi koalisi pada legislatif akan membuat kebijakan oleh pemerintah berjalan mulus. Sebaliknya, jika oposisi mendominasi legislatif maka rencana oleh pemerintah akan terhambat. Hal tersebut terjadi karena oposisi dalam legislatif memainkan fungsi *check and balances*.

4. Research Method

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian mengenai riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Metode kualitatif telaah literatur berfokus pada analisis dan sintesis karya tulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan, membaca, dan mengevaluasi literatur yang ada untuk memahami peran dan dampak suatu fenomena (Bado, Basri. 2022). Dengan metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif. Studi kepustakaan sebagai metode utama dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal akademik, artikel, laporan, dan dokumen resmi.

Terkait dengan sumber data untuk penelitian, peneliti akan menggunakan data yang berasal dari berbagai macam literatur akademik yang berkaitan dengan topik yang peneliti sedang teliti, yakni Analisis Oligarki Politik di DPR pada Masa Pemerintahan Jokowi (2019-2024). Dengan sumber data yang akan digunakan, seperti: Jurnal Ilmiah, yang memiliki kaitan dengan pembahasan dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kasus akan dijadikan sumber data yang utama untuk peneliti gunakan. Sehingga sumber data tersebut mampu membantu peneliti mengklarifikasi konsep-konsep kunci dan temuan sebelumnya dan juga memberikan landasan yang kuat untuk analisis yang lebih mendalam. Hal ini membantu peneliti dalam mengembangkan wawasan yang komprehensif dan holistik mengenai fenomena yang sedang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat lebih kaya dan bermakna.

5. Results and Discussion

5.1. *Dinamika Oligarki Politik di DPR Pada Masa Pemerintahan Jokowi (2019-2024)*

Keterkaitan anggota DPR dengan oligarki ekonomi dan politik di Indonesia terlihat jelas di dalam hubungan antara elit politik dan kelompok bisnis besar. Banyak anggota DPR memiliki latar belakang sebagai pengusaha atau terafiliasi dengan korporasi besar, yang sering kali menjadi penentu dalam pengambilan keputusan politik. Hubungan ini memperkuat pengaruh oligarki melalui pendanaan kampanye atau dukungan politik yang berorientasi pada kepentingan ekonomi para elit. Penelitian menunjukkan bahwa koneksi semacam ini mempengaruhi legislasi untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha, terutama di sektor-sektor strategis, seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan energi (Winters, 2011; Ford & Pepinsky, 2014)

Sebagai contoh, Undang-Undang Minerba (2020) memberikan kelonggaran besar kepada perusahaan tambang besar, sementara perlindungan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan minim diperhatikan. Proses pembahasannya yang minim akan partisipasi publik memperlihatkan dominasi kelompok oligarki dalam legislasi (Ford & Pepinsky, 2014). Proses legislasi dilakukan tanpa partisipasi publik yang memadai, sehingga menciptakan persepsi bahwa kebijakan ini lebih berpihak pada kepentingan oligarki (Suteki, 2022). Demikian pula dengan Undang-Undang Cipta Kerja (2020) yang disahkan melalui metode omnibus law UU ini dikritik karena dianggap mengabaikan perlindungan lingkungan dan hak-hak buruh. Banyak analis berpendapat bahwa UU ini dirancang untuk mempermudah investasi, terutama bagi oligarki di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan sumber daya alam (Suteki, 2022; Wibowo et al., 2024). Selain itu, revisi Undang-Undang KPK (2019) juga menjadi contoh nyata bagaimana kepentingan oligarki dapat melemahkan institusi yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Revisi ini mendapat kritik tajam karena dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dianggap sebagai langkah untuk melindungi elit politik dan pengusaha besar yang merasa terancam oleh tindakan hukum KPK (Winters, 2020). Keterkaitan erat antara elit politik dan oligarki ekonomi ini tidak hanya membatasi independensi legislatif tetapi juga mempengaruhi arah kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok kecil dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Oligarki memegang kendali yang signifikan dalam menentukan isu dan arah kebijakan publik melalui berbagai mekanisme, termasuk lobi politik, pengaruh media, dan pendanaan kampanye. Kekayaan finansial yang besar memungkinkan mereka untuk membentuk opini publik dan memberikan tekanan kepada para legislator. Akibatnya, terjadi ketergantungan antara politisi dan kelompok elite, yang menciptakan siklus pengaruh dimana legislator lebih cenderung memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan oligarki dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Minimnya Transparansi dalam Proses Legislatif. Proses pembuatan kebijakan sering kali dilakukan secara tertutup, dengan partisipasi publik yang terbatas atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Kurangnya transparansi ini mengurangi kemampuan masyarakat untuk memantau dan mengawasi proses legislasi, sehingga meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan (Sami an & Prakasa, 2021). Tanpa mekanisme yang jelas dan transparan, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat eksklusif dan hanya melayani kepentingan kelompok tertentu. Minimnya keterlibatan masyarakat sipil juga menciptakan

kesenjangan antara harapan publik dan realitas kebijakan yang dihasilkan. Akibatnya, masyarakat sering kali merasa bahwa pemerintah tidak responsif terhadap kebutuhan mereka, yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan terhadap institusi negara. Transparansi yang rendah juga mempersulit upaya untuk menegakkan akuntabilitas, karena sulit untuk memastikan apakah kebijakan tertentu benar-benar dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan publik atau sekadar melayani agenda oligarki.

Salah satu konsekuensi paling serius dari pengaruh oligarki adalah erosi norma-norma demokrasi. Sistem demokrasi seharusnya memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan aspirasi rakyat melalui proses yang inklusif dan partisipatif. Namun, ketika oligarki menguasai arena politik, pengambilan keputusan cenderung terjadi dalam lingkaran elite, yang secara efektif mengecualikan masyarakat umum dari proses tersebut (Suteki, 2022). Pengaruh yang kuat dari kelompok oligarki juga dapat menghambat lahirnya kebijakan-kebijakan yang progresif dan mendukung keadilan sosial. Keputusan-keputusan strategis sering kali dibuat tanpa memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, yang pada akhirnya memicu apatisisme politik. Masyarakat yang merasa tidak memiliki suara dalam kebijakan publik cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana rendahnya partisipasi publik semakin memperkuat posisi oligarki.

Ketika kebijakan lebih condong untuk menguntungkan kelompok tertentu, berbagai masalah struktural dapat muncul dalam jangka panjang, termasuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang menguntungkan segelintir elite sering kali memperburuk ketimpangan ekonomi, dengan keuntungan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu sementara sebagian besar masyarakat tetap dalam kondisi sulit. Penurunan Kualitas Layanan Publik, sumber daya negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat dialihkan untuk proyek-proyek yang lebih menguntungkan secara politik atau ekonomi bagi oligarki. Krisis Kepercayaan Publik, apatisisme politik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah semakin meluas, yang pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi dan memperburuk ketidakstabilan sosial (Suteki, 2022). Penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan memastikan bahwa proses legislasi berjalan secara transparan dan partisipatif, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan publik, bukan hanya kelompok elite.

Koalisi politik yang besar dimungkinkan dengan adanya sistem multi-partai yang diterapkan di Indonesia. Mietzner (2016) menjelaskan bahwa sistem multi partai dahulu dipercaya sebagai tantangan kepada presiden dalam sistem presidensialisme untuk beraliansi pada partai yang mengontrol parlemen, tetapi anggapan itu dapat dibantah bahwa presiden dapat membentuk aliansi kepada partai penguasa parlemen dengan menggunakan lima alat, yaitu otoritas cabinet, kekuatan anggaran, kekuatan partisan, kekuasaan legislatif, dan pertukaran bantuan. Contoh penggunaan alat tersebut dapat dilihat dengan pemberian jabatan Menteri atau posisi koordinator oleh Jokowi kepada kader partai yang menjadi koalisi Jokowi untuk memperlancar pembahasan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah (Asrinaldi & Yusoff, 2023). Keadaan tersebut tergambarkan pada **Tabel 1** yang mana seluruh partai koalisi mendapat kursi di kabinet Joko Widodo. Lebih dari itu, partai-partai koalisi mendominasi kabinet dengan menempati lebih dari setengah dari keseluruhan jumlah kursi kabinet. Hal ini menandakan kabinet tersebut sarat akan politisasi serta kepentingan.

Tabel 1. Keanggotaan Kabinet Joko Widodo 2024

No.	Partai	Keanggotaan Kabinet dari Koalisi Partai	Keanggotaan Kabinet dari Non Partai
		Jumlah Kursi	Jumlah Kursi
1	PDI Perjuangan	9	
2	Golkar	6	
3	PKB	3	
4	Gerindra	1	
5	Nasdem	1	22
6	PPP	3	
7	PAN	1	
8	Demokrat	1	
9	Perindo	1	
10	PSI	1	
11	PBB	1	
Total		28	22

Sumber: Farisa (2024)

Oligarki di DPR pada periode 2019-2024 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan representasi publik. Keberadaan oligarki ini terlihat jelas dalam proses pengesahan undang-undang yang cenderung tidak transparan dan lebih menguntungkan kepentingan kelompok elite. Misalnya, revisi terhadap UU KPK dan UU Cipta Kerja dilakukan dengan cepat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai, yang menciptakan situasi di mana kebijakan publik dapat dikendalikan oleh oligarki (Primaghoya, 2023). Selain itu, rendahnya tingkat akuntabilitas DPR juga menjadi perhatian, di mana hanya sekitar 10% dari total rancangan undang-undang yang berhasil diselesaikan dengan baik (Rohmah, 2024).

Berdasarkan teori Dahl, yang mana mengatakan bahwa kehadiran demokrasi mengharuskan representasi masyarakat dalam politik. Namun, dominasi oligarki ini justru mengurangi representasi publik dalam proses legislasi. Partai politik menyalahi perannya sebagai pengagregasi kepentingan masyarakat dan menaikkan kadernya untuk duduk di kursi legislatif hanya untuk mementingkan kepentingan elit dan mengurangi keterlibatan masyarakat. Hal ini terlihat pada proses legislasi UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU KPK. Banyak calon legislatif yang didukung oleh oligark, sehingga suara masyarakat sering kali terpinggirkan oleh kepentingan sekelompok individu kaya (Primaghoya, 2023). Praktik politik semacam ini memperkuat keberadaan dinasti politik dan menghalangi peluang bagi calon independen untuk bersaing secara adil (Rohmah, 2024). Akibat dari erosi prinsip-prinsip demokrasi ini adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Menurut laporan dari Freedom House, Indonesia mengalami kemunduran dalam hal kebebasan sipil sejak tahun 2015, dengan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi bersamaan dengan pengesahan undang-undang yang kontroversial (Primaghoya, 2023).

6. Conclusion

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika oligarki politik di DPR selama masa pemerintahan Jokowi (2019-2024) dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, terlihat bahwa oligarki politik memainkan peran dominan dalam pembentukan kebijakan legislatif, yang tidak jarang berorientasi pada kepentingan elit ekonomi dan politik dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini terlihat dalam beberapa kebijakan kontroversial, seperti revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok oligarki. Keterlibatan elit politik yang memiliki afiliasi dengan korporasi besar menunjukkan hubungan erat antara kepentingan

politik dan ekonomi. Dominasi ini tidak hanya mengikis fungsi check and balances dalam sistem demokrasi tetapi juga membuat lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Minimnya partisipasi publik dan juga kurangnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan memperburuk situasi ini, yang berakibat terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin nyata adanya.

Kelebihan penelitian ini adalah pendekatannya yang holistik, menggunakan studi kepustakaan untuk mengeksplorasi berbagai dimensi pengaruh oligarki, mulai dari proses legislasi hingga dampaknya terhadap partisipasi politik masyarakat. Namun kekurangannya terletak pada keterbatasan data empiris langsung yang dapat memberikan gambaran yang lebih rinci lagi terkait pola interaksi antara oligarki dan lembaga legislatif. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa pentingnya upaya memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi dalam legislasi, dan juga memperluas partisipasi publik sebagai langkah penting untuk melawan dominasi oligarki dan memperbaiki kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Rekomendasi untuk penelitian mendatang meliputi eksplorasi lebih jauh lagi mengenai peran masyarakat sipil, media sosial, dan strategi untuk meminimalkan pengaruh oligarki dalam pengambilan keputusan politik.

References

- Bado, B. (2022). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah. Tahta Media Grup.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Februana, N. (2023). *Solusi Kendalikan Oligarki Ekonomi-Politik di Indonesia*. RPK Indonesia.
- Ford, M., & Pepinsky, T. B. (2014). Beyond oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hakim, M. Z., & Jurdi, F. (2017). Immature politicians and oligarchy as a threat to democracy. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(4), 342-354. <https://www.doaj.org/article/9d92b2289ee54353b4060e96f991f4d7>
- Haryanto, & Mahsun, M. (2024). Business and Politics in Urban Indonesia: Patrimonialism, Oligarchy and the State in Two Towns. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/18681034241264574>
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385–395. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i2.269>
- Noor, F. (2016). Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 46(1), 1–17.
- Primaghoya, E. (2023). Buah pahit pemilu yang oligarkis. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/05/buah-pahit-pemilu-yang-oligarkis>
- Rohmah, E. I. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 1-12. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/download/12424/7049/55195>
- Sami an, S. an, & Prakasa, S. U. W. (2021). Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 329–345. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737>
- Setiawan, A. (2022). *Fenomena Oligarki Elit Politik di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Suftyadi, A. R., Heniarti, D. D., & Nu'man, A. H. (2023). Oligarchic Politics in the Context of a Democratic Rule of Law in Relation to the Principle of Expediency. *Journal of Legal Studies*, 32(6), 67-77. <https://www.doaj.org/article/f93611fea0ce448b8f7eeaaa12d3f3d9>
- Suteki. (2022). Analisis kebijakan dalam konteks oligarki: Studi kasus Undang-Undang Minerba dan Cipta Kerja. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 15(2), 123-140.
- Wibawa, F. (2023). *Ritual Oligarki Menuju 2024*. LP3ES. Suteki, S. (2022). Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum. *Crepido*, 4(2), 161–170. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170>

- Wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Saintika, H. R., & Isfany, F. R. (2024). Media of Law and Sharia Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(3), 231–246. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.102>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Winters, J. A. (2020). Revisiting oligarchic influence in Indonesia: Politics, power, and economic interests. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(3), 321-345.
- Wibowo, B., et al. (2024). Omnibus law and the dominance of economic oligarchy in Indonesia. *Economic Policy Review*, 18(1), 45-60.